

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Begitu juga pembangunan di Indonesia merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka merealisasikan tujuan negara.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochim Dahuri, 2004)

Sedangkan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat adalah sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan negara diatas, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan program-program pembangunan. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah merata di semua aspek-aspek

kehidupan masyarakat diantaranya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sarana prasarana dimana tujuan akhir dari semua program tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari semua program yang dilaksanakan tentunya ada yang berhasil dan ada juga yang kurang maksimal.

Pembangunan dimasa sebelum reformasi atau sebelum otonomi daerah adalah pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan berbasis pertumbuhan yang melahirkan strategi pembangunan dari atas ke bawah (top down strategy). Sehingga kekuasaan dan segala sesuatu sepenuhnya berada dipusat dan masyarakat tinggal melaksanakannya. Strategi ini ternyata tidak cocok diterapkan di negara berkembang seperti di Indonesia yang kondisi alam, geografi, dan sosialnya sangat jauh berbeda. Konsep yang terkenal dengan istilah trickle down effect (menetes ke bawah) ini tidak berjalan sesuai harapan, karena sistem ini mengabaikan pranata kebudayaan dan sistem nilai dimasyarakat. Karena pembangunan dimasyarakat tidak berbasis pada potensi diri sendiri tetapi bergantung pada orang lain. Konsep pembangunan Top Down dimasa lalu mengakibatkan pembangunan yang kurang tepat sasaran dan tidak merata diseluruh wilayah negara Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan antara wilayah satu dengan yang lain terutama daerah pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa.

Indonesia menghadapi permasalahan kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan

pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.

Strategi untuk penanggulangan dan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebenarnya merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dinilai berhasil menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2014 Pemerintah kembali meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Sama halnya dengan PNPM-PPK, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) diberikan secara langsung kepada masyarakat di tingkat Kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), perencanaan dilakukan dari bawah lewat musyawarah tingkat dukuhan dan musyawarah tingkat desa (MD) untuk menentukan prioritas usulan tiap desa. Selanjutnya hasil dari MD dibawa ke forum MAD di tingkat Kecamatan. Melalui PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kecamatan Ngebel merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan Program Pengembangan Kecamatan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, PNPM-PPK tahun 2007 dan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dengan kondisi geografis yang berupa perbukitan dan pegunungan, merupakan daerah perdesaan dengan kondisi sarana prasarana banyak yang belum memadai. Hal ini berpengaruh pada taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya

kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngebel memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desanya masing-masing. Dana yang diberikan melalui PNPM Mandiri Perdesaan ini merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Sehingga bisa dikatakan kunci keberhasilan program ini ada di tangan masyarakat. Karena masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program PNPM Mandiri Perdesaan.

Swadaya merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi masyarakat. Swadaya dalam program ini bisa diwujudkan dalam bentuk uang, tenaga, bahan dan alat pada saat perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Peran Swadaya Masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran swadaya masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa-desa seluruh wilayah Kecamatan Ngebel di masa yang akan datang.
- 1.4.2. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman, mengembangkan cakrawala berpikir bagi penulis dalam meneliti, menganalisa serta menyimpulkan suatu permasalahan dan pemecahannya